

III.METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. (Suharsimi, 2002). Variabel dalam penelitian ini adalah Struktur ekonomi, Sektor Pertanian, Sektor Industri, Sektor Perdagangan, dan Sektor Jasa-jasa dengan indikator Tenaga Kerja dan PDRB. Definisi operasional variabel penelitian ini adalah :

- a) Struktur Ekonomi adalah suatu proses perubahan struktur perekonomian (Tranformasi ekonomi) dari sektor primer ke sektor sekunder kemudian ke sektor tersier di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi permintaan, perdagangan, produksi dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita (Chenery 1960,

1964; Chenery, Robinson dan Syrquin 1986; Chenery dan Syrquin 1975; Chenery dan Taylor 1968; Chenery dan Watanabe 1958).

- b) Sektor Pertanian adalah nilai komoditas-komoditas pertanian dari subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan (BPS).
- c) Sektor Industri adalah nilai dari produksi industri besar atau sedang yang memperkerjakan paling sedikit 20 tenaga kerja (BPS).
- d) Sektor Perdagangan adalah nilai semua keuntungan yang timbul dari transaksi diwilayah domestik seperti subsektor perdagangan, subsektor jasa akomodasi, dan subsektor restoran (BPS).
- e) Sektor Jasa adalah nilai seluruh produksi jasa-jasa yang dikelola oleh swasta sedangkan yang dikelola oleh pemerintah merupakan output subsektor jasa pemerintahan (BPS).
- f) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai jumlah nilai tambah yang di hasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS).
- g) Tenaga kerja adalah Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antara negara satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 15 tahun, tanpa

batas umur maksimum. Tenaga kerja (*manpower*) dibagi pula ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (*laborforce*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia yang bekerja, atau yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Selanjutnya, angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subsektor yaitu kelompok pekerja dan penganggur. Yang dimaksud pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan, dan memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Adapun yang dimaksud penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan masih mencari pekerjaan. (Dumairy, 1996)

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mencatat teori-teori dari buku-buku literatur, bacaan-bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data-data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Lampung Selatan.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip dan juga termasuk buku-buku tertentu, pendapat, teori, atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen yang diperlukan adalah data Jumlah tenaga kerja menurut lapangan kerja utama serta nilai PDRB di Kabupaten Lampung Selatan

D. Metode Analisis

Analisis *Shift Share* adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Teknik analisis *shift share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah, seperti tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh : pertumbuhan nasional (N), *industri mix*/bauran industri (M), dan keunggulan kompetitif (C). Menurut Prasetyo Soepomo (1993) bentuk umum persamaan dari analisis *shift share* dan komponen-komponennya adalah :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan :

i = Sektor-sektor ekonomi yang diteliti

j = Variabel wilayah yang diteliti Kab.Lampung Selatan

n = Variabel wilayah Provinsi lampung

D_{ij} = Perubahan sektor i di daerah j

N_{ij} = Pertumbuhan nasional sektor i di daerah j

M_{ij} = Bauran industri sektor i di daerah j

C_{ij} = Keunggulan kompetitif sektor i di daerah j

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Tenaga kerja dan PDRB yang dinotasikan sebagai (y). maka :

$$D_{ij} = y^*_{ij} - y_{ij}$$

$$N_{ij} = y_{ij} \cdot r_n$$

$$M_{ij} = y_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan :

y_{ij} = Tenaga Kerja/PDRB sektor i di daerah j (Lampung Selatan)

y^*_{ij} = Tenaga Kerja/PDRB sektor i di daerah j akhir tahun analisis (Lampung Selatan)

r_{ij} = Laju pertumbuhan sektor i di daerah j (Lampung Selatan)

r_{in} = Laju pertumbuhan sektor i di daerah n (Lampung Selatan)

r_n = Rata-rata Laju pertumbuhan Tenaga Kerja/PDRB di daerah (Provinsi Lampung)

$$r_{ij} = \frac{(y^*_{ij} - y_{ij})}{y_{ij}}$$

$$r_{in} = \frac{(y^*_{in} - y_{in})}{y_{in}}$$

$$r_n = \frac{(y^*_n - y_n)}{y_n}$$

Keterangan :

y_{in} = Tenaga kerja/GNP sektor i di daerah n (Provinsi)

y^*_{in} = Tenaga kerja/GNP sektor i di daerah n akhir tahun analisis (Provinsi)

y_n = Total Tenaga kerja/GNP semua sektor di daerah n (Provinsi)

y^*_n = Total Tenaga Kerja/GNP semua sektor di daerah n (Provinsi) akhir tahun analisis

Untuk suatu daerah, pertumbuhan nasional / regional, bauran industri dan keunggulan kompetitif dapat dijumlahkan untuk semua sektor sebagai keseluruhan daerah, sehingga persamaan *shift share* untuk sektor I di wilayah j adalah:

$$D_{ij} = y_{ij} \cdot r_n + y_{ij} (r_{in} - r_n) + y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

E. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan

1. Sejarah Kabupaten Lampung Selatan

Sejarah Kabupaten Lampung Selatan erat kaitannya dengan dasar pokok undang-undang dasar 1945. Dalam undang-undang dasar tersebut, pada bab VI pasal 18 disebutkan bahwa pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan undang-undangserta memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Sebagai realisasi dari pasal 18 undang-undang dasar 1945, lahirlah undang-undang nomor 1 tahun 1945. Undang-undang yang mengatur tentang kedudukan komite nasional daerah, yang pada hakekatnya adalah undang-undang di daerah yang

pertama. Isinya antara lain mengembalikan kekuasaan di daerah kepada aparat berwenang yaitu pamong praja dan polisi. Selain itu untuk menegakan pemerintah di daerah yang rasional dengan mengikut sertakan wakil rakyat atas dasar kedaulatan rakyat.

Selanjutnya dengan undang-undang nomor 22 tahun 1948, tentang pembentukan daerah otonom dalam wilayah republik Indonesia yang susunan tingkatnya sebagai berikut:

1. Provinsi daerah tingkat I
2. Kabupaten/Kotamadya (kota besar) daerah tingkat II
3. Desa (kota kecil) daerah tingkat III

Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1948, maka lahirlah provinsi Sumatra Selatan dengan perpu nomor 3 tanggal 14 agustus 1950, yang dituangkan dalam perda Sumatra Selatan dengan nomor 6 tahun 1950. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pembentukan dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan pemerintahan untuk daerah provinsi, kabupaten, kota besar dan kota kecil maka keluarlah peraturan daerah provinsi Sumatra Selatan nomor 6 tahun 1950 tentang pembentukan DPRD kabupaten di seluruh provinsi Sumatra Selatan.

Perkembangan selanjutnya guna lebih terarahnya pemberian otonomi kepada daerah bawahannya, diatur selanjutnya dengan undang-undang darurat dengan nomor 4 tahun 1956 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi Sumatra selatan sebanyak 14 kabupaten, diantaranya kabupaten lampung selatan

beserta DPRD-nya dan 7 buah dinas otonom. Untuk penyempurnaan lebih lanjut tentang struktur pemerintahan kabupaten, lahirlah undang-undang nomor 1 tahun 1957 yang tidak jauh berbeda dengan undang-undang nomor 22 tahun 1948. Hanya dalam undang-undang nomor 1 tahun 1957 dikenal dengan system otonomi riil yaitu pemberian otonomi termasuk medebewind.

Kemudian untuk lebih sempurnanya system pemerintahan daerah, lahirlah undang-undang nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang mencakup semua unsur-unsur progresif daripada:

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1945
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1948
3. Undang-undang nomor 1 tahun 1957
4. Penpres nomor 6 tahun 1959
5. Penpres nomor 5 tahun 1960

Selanjutnya karena undang-undang nomor 18 tahun 1965 dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, maka akan ditinjau kembali. Sebagai penyempurnaan, lahirlah undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di daerah yang sifatnya lebih luas dibandingkan dengan yang sebelumnya. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang pemerintahan saja tetapi lebih luas dari itu, termasuk dinas-dinas vertika yang di atur pula didalamnya.

Selain itu undang-undang nomor 5 tahun 1974 diperkuat dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian disempurnakan oleh

undang-undang nomor 32 tahun 2008. Undang-undang yang terakhir ini lebih jelas dan tegas menyatakan bahwa prinsip yang dipakai bukan lagi otonomi riil dan seluas-luasnya, tetapi otonomi nyata dan bertanggung jawab serta bertujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

2. Geografi

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara $105^{\circ}14'$ sampai dengan $105^{\circ}45'$ bujur timur dan $5^{\circ}15'$ sampai dengan 6° lintang selatan. Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah lain di Indonesia yang merupakan iklim tropis.

Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu teluk Lampung, di teluk Lampung terdapat sebuah pelabuhan panjang dimana kapal-kapal dalam dan luar negeri dapat merapat. Secara umum pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung. Sejak tahun 1982 Pelabuhan Panjang termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Namun Kabupaten Lampung selatan masih mempunyai pelabuhan yang terletak di kecamatan Penengahan, yaitu pelabuhan penyebrangan Bakauheni, yang merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau Sumatera bagian

selatan. Jarak antara pelabuhan Bakauheni dengan pelabuhan Merak kurang lebih 30 kilometer, dengan waktu tempuh kapal penyebrangan sekitar 1,5 jam.

Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daratan kurang lebih 2.007,1 km², dengan kantor pusat pemerintahan di Kota Kalianda, yang diresmikan menjadi ibu kota kabupaten Lampung Selatan oleh menteri dalam negeri pada tanggal 11 februari 1982.

Sampai saat ini kabupaten Lampung Selatan telah mengalami pemekaran dua kali. Pertama berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 1997 yang ditetapkan pada tanggal 3 januari tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Tanggamus, kemudian yang kedua berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran pada tanggal 10 agustus 2008.

3. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil proyeksi tahun 2010 berjumlah 912.490 jiwa, yang terdiri dari 470.303 jiwa laki-laki dan 442.187 perempuan. Sex ratio penduduk atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 106.36 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa perempuan terdapat 106 jiwa laki-laki.

Berdasarkan data yang ada, penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang

Penduduk asli Lampung, khususnya sub suku Lampung peminggir, umumnya berkediaman di sepanjang pantai pesisir, seperti di kecamatan penengahan, kalianda, katibung. Penduduk sub suku Lampung lainnya tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam macam suku dari seluruh Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Sumatra Selatan dan lain-lain. Dari semua suku tersebut yang merupakan pendatang terbesar berasal dari pulau Jawa. Besarnya penduduk Lampung Selatan yang berasal dari pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda, dan dilanjutkan dengan Transmigrasi pada zaman setelah kemerdekaan, disamping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan.

4. Ketenagakerjaan

Banyaknya perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2010 adalah 71 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 26.828 orang. Tenaga kerja yang dimaksud terdiri dari 21.268 orang WNI laki-laki, 5.546 orang WNI perempuan, dan 14 orang WNA laki-laki. Rata-rata besarnya kebutuhan minimum di Kabupaten Lampung Selatan per bulan meningkat dari Rp 1.500.000,- pada tahun 2009 menjadi Rp 1.600.500,- pada tahun 2010.

Banyaknya pasar kerja yang terdaftar di Disnaker Kabupaten Lampung Selatan sebesar 4.638 orang dengan rincian 2.166 laki-laki dan 2.472 orang perempuan.

Sedangkan permintaan yang terdaftar 1.469 orang dengan rincian 337 orang laki-laki

dan 1.132 perempuan. Jumlah penempatan sama dengan jumlah permintaan . Dan pada tahun 2010 terdapat penghapusan sebesar 4.588 orang.

Jumlah PNS pada daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2010 sebesar 9.821 orang, Dengan rincian 4.813 orang laki-laki dan 5.008 orang perempuan.